

ANALISIS KONTRIBUSI PAJAK DAERAH, RETRIBUSI DAERAH DAN BAGI HASIL PAJAK TERHADAP BELANJA MODAL DI PROVINSI SUMATERA UTARA

Author:

Gracia Lavenia Tampubolon¹

Tia Novira Sucipto²

Hendra Saputra³

Afiliation:

Universitas Pembangunan Panca

Budi¹

Corresponding email

gracialaveniaa13@gmail.com

tianovirasucipto@dosen.pancabudi.ac.id



*This is an Creative Commons License This work is
licensed under a Creative Commons Attribution-
NonCommercial 4.0 International License*

Abstrak

Latar belakang :

Belanja modal adalah uang yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk membeli atau menciptakan aset tahan lama yang bermanfaat dalam jangka panjang, seperti membangun jalan, jembatan, gedung, dan layanan publik lainnya. Tingginya kebutuhan belanja modal menuntut pemerintah daerah untuk memiliki sumber pendanaan yang kuat dan berkelanjutan agar pembangunan daerah dapat berjalan secara optimal. Sumber pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama pajak daerah dan retribusi daerah, memiliki peran penting dalam mendukung pembiayaan belanja modal.

Metode penelitian:

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode kausal. Pendekatan ini mengamati bagaimana suatu hal mengarah pada hal lain dengan mempelajari hubungan antara berbagai faktor. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari

Hasil penelitian:

Pajak daerah berpengaruh signifikan secara parsial terhadap belanja modal, retribusi daerah berpengaruh signifikan secara parsial terhadap belanja modal, bagi hasil pajak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap belanja modal, dan pajak daerah, retribusi daerah, bagi hasil pajak secara simultan berpengaruh terhadap belanja modal

Kata kunci: pajak daerah, retribusi daerah, bagi hasil pajak dan belanja modal

1. Pendahuluan

Belanja modal adalah uang yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk membeli atau menciptakan aset tahan lama yang bermanfaat dalam jangka panjang, seperti membangun jalan, jembatan, gedung, dan layanan publik lainnya. Tingginya kebutuhan belanja modal menuntut pemerintah daerah untuk memiliki sumber pendanaan yang kuat dan berkelanjutan agar pembangunan daerah dapat berjalan secara optimal. Sumber pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama pajak daerah dan retribusi daerah, memiliki peran penting dalam mendukung pembiayaan belanja modal.

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib masyarakat kepada daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan, sedangkan retribusi daerah merupakan pungutan atas jasa atau pemberian izin tertentu oleh pemerintah daerah. Selain itu, bagi hasil pajak yang diterima dari pemerintah pusat juga menjadi salah satu sumber pendanaan daerah yang berkontribusi terhadap kemampuan fiskal daerah. Provinsi Sumatera Utara sebagai salah satu provinsi dengan potensi ekonomi yang besar memiliki kebutuhan pembangunan infrastruktur yang cukup tinggi. Namun demikian, kemampuan fiskal daerah dalam membiayai belanja modal masih menghadapi tantangan, seperti fluktuasi penerimaan pajak daerah, rendahnya kontribusi retribusi daerah, serta ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana kontribusi pajak daerah, retribusi daerah, dan bagi hasil pajak dalam mendukung pembiayaan belanja modal di Provinsi Sumatera Utara.

Akuntabilitas dan transparansi adalah belanja daerah harus dijalankan dengan transparan dan akuntabel. Ini melibatkan pelaporan yang tepat waktu dan akurat tentang penggunaan anggaran serta audit untuk memastikan dana digunakan sesuai dengan peraturan. Belanja modal memiliki peran penting dalam menggerakkan pembangunan di tingkat lokal dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengawasan yang cermat terhadap belanja daerah sangat penting untuk memastikan bahwa dana digunakan secara efisien dan efektif. Pendapatan Daerah Asli, atau PAD, adalah pendapatan yang dikumpulkan suatu daerah sesuai dengan aturannya sendiri dan sebagaimana diwajibkan oleh hukum. PAD bertujuan untuk membantu pemerintah daerah mendapatkan dana yang mereka butuhkan untuk melaksanakan otonomi daerah berdasarkan potensi mereka sendiri, yang menunjukkan gagasan desentralisasi. Pendapatan daerah asli berasal dari berbagai sumber, dengan pajak sebagai sumber utama.

Berdasarkan informasi ini, kita perlu melakukan penelitian untuk mengkaji bagaimana pajak daerah, pungutan daerah, dan pendapatan pajak bagi hasil berkontribusi terhadap belanja modal di Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai peran masing-masing sumber pendapatan daerah dalam pembiayaan belanja modal serta menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif dan berkelanjutan. Akuntabilitas dan transparansi adalah belanja modal harus dijalankan dengan transparan dan akuntabel. Ini melibatkan pelaporan yang tepat waktu dan akurat tentang penggunaan anggaran serta audit untuk memastikan dana digunakan sesuai dengan peraturan. Belanja modal memiliki peran penting dalam menggerakkan pembangunan di tingkat lokal dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan dan pengawasan yang cermat terhadap belanja daerah sangat penting untuk memastikan bahwa dana digunakan secara efisien dan efektif. Pendapatan Asli Daerah, atau PAD, adalah pendapatan yang dikumpulkan suatu daerah berdasarkan aturan dan hukumnya sendiri sebagaimana diatur dalam undang-undang. PAD bertujuan untuk membantu pemerintah daerah mendapatkan dana yang mereka butuhkan untuk menjalankan otonomi daerah berdasarkan kekuatan mereka sendiri, menunjukkan bagaimana kekuasaan dibagi secara lebih merata di berbagai daerah. Pendapatan asli daerah berasal dari berbagai sumber, sebagian besar dari pajak.

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya, pertanyaan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah kontribusi pajak daerah berpengaruh secara parsial terhadap belanja modal di Provinsi Sumatera Utara?
2. Apakah retribusi daerah berpengaruh secara parsial terhadap belanja modal di Provinsi Sumatera Utara?

3. Apakah Bagi Hasil Pajak berpengaruh secara parsial terhadap belanja modal di Provinsi Sumatera Utara ?
4. Apakah Kontribusi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Bagi Hasil Pajak berpengaruh secara simultan terhadap belanja modal di Provinsi Sumatera Utara ?

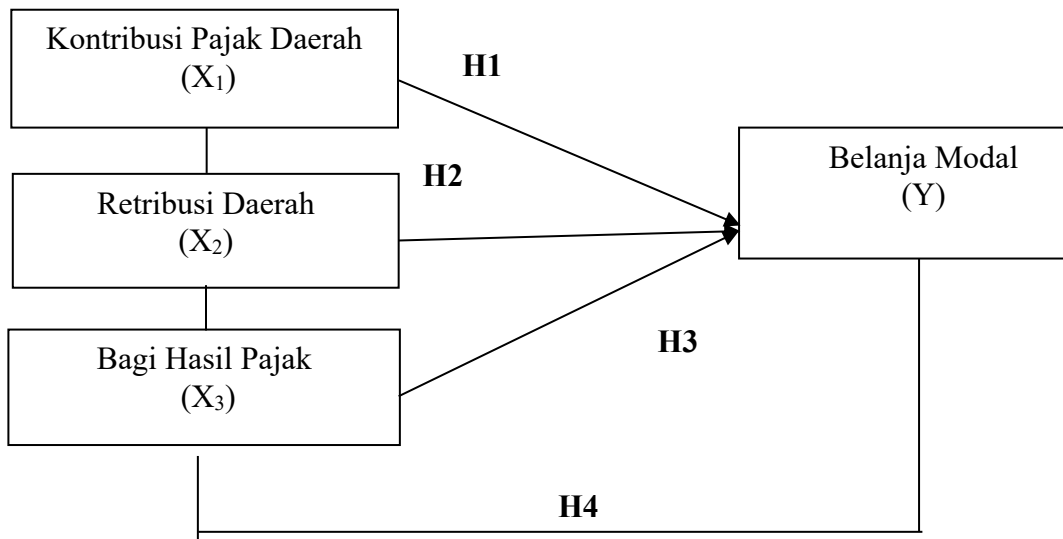
2. Studi Literatur

2.1 Grand Teori Asimetri

Teori Asimetri (Asimetri Pemerintah Daerah) adalah konsep yang mengacu pada ketidaksetaraan dalam sumber daya, kekuasaan, dan kewenangan antara pemerintah daerah yang berbeda dalam suatu negara. Dalam konteks ini, asimetri menggambarkan perbedaan signifikan dalam kapasitas, kemampuan, atau sumber daya antara entitas pemerintah daerah, yang dapat berdampak pada kebijakan, keadilan, dan dinamika politik. Beberapa elemen kunci dalam teori asimetri pemerintah daerah mencakup ketidaksetaraan sumber daya adalah beberapa pemerintah daerah mungkin memiliki lebih banyak sumber daya keuangan, manusia, atau infrastruktur daripada yang lain. Ini dapat muncul karena perbedaan dalam perkembangan ekonomi, keragaman sumber daya alam, atau faktor lain. Ketidaksetaraan kewenangan hukum adalah Hukum dan peraturan yang mengatur pemerintah daerah dapat bervariasi, sehingga beberapa pemerintah daerah mungkin memiliki lebih banyak kewenangan atau otonomi dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya daripada yang lain. Ketidaksetaraan akses layanan publik adalah warga pemerintah daerah yang berbeda mungkin tidak memiliki akses yang sama ke layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur, karena perbedaan dalam sumber daya dan kebijakan.

2.2 Kerangka Konseptual

Adapun judul dari penelitian ini terkait dengan “Kontribusi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Bagi Hasil Pajak terhadap Belanja Modal”. Kerangka konseptualnya dapat dilihat dibawah ini :



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

2.2 Hipotesis

Berdasarkan permasalahan dan kerangka penelitian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- H.1 Kontribusi Pajak Daerah berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap belanja modal di Provinsi Sumatera Utara.
- H.2 Retribusi Daerah berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap belanja modal di Provinsi Sumatera Utara.
- H.3 Bagi Hasil Pajak berpengaruh secara parsial dan signifikan terhadap belanja modal di Provinsi Sumatera Utara.
- H.4 Kontribusi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Bagi Hasil Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal di Provinsi Sumatera Utara.

3. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode kausal. Pendekatan ini mengamati bagaimana suatu hal mengarah pada hal lain dengan mempelajari hubungan antara berbagai faktor. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: Teknik Dokumentasi merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk peneliti dalam mendokumentasikan data yang dibutuhkan untuk kepentingan penelitian dan studi Perpustakaan merupakan salah satu studi yang digunakan untuk mendapatkan teori-teori yang mendukung penelitian ini. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa regresi linier berganda dan data diproses dengan menggunakan program SPSS versi 28. Adapun populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara yakni sebanyak 33 kabupaten/kota, sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya 14 kota yang ada di Sumatera Utara selama 3 tahun dimulai dari tahun 2022, 2023 dan 2024. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Dimana kriteria nya terdiri dari :

1. Kontribusi pajak daerah yang besar.
2. Retribusi daerah yang besar.
3. Bagi hasil pajak yang digunakan cukup besar.

Kriteria diatas maka sampel yang diambil terdiri dari :

Tabel 3.1
Populasi/Sampel Penelitian

No.	Kabupaten/Kota	Kriteria	Pengambilan	Sampling	Sampel
		1	2	3	
1	Kota Gunung Sitoli	x	x	x	
2	Mandailing Natal	√	√	√	13
3	Kota Padang Sidempuan	x	x	x	
4	Kota Sibolga	x	x	x	
5	Tapanuli Utara	x	x	x	
6	Toba	x	x	x	
7	Labuhan Batu	x	x	x	10
8	Asahan	√	√	√	12
9	Simalungun	√	√	√	9
10	Dairi	x	x	x	
11	Karo	√	√	√	11
12	Deli Serdang	√	√	√	2
13	Langkat	√	√	√	3
14	Tapanuli Utara	x	x	x	
15	Humbang Hasundutan	x	x	x	
16	Pakpak Bharat	x	x	x	

17	Samosir	x	x	x	
18	Serdang Bedagai	√	√	√	4
19	Batu Bara	√	√	√	5
20	Padang Lawas Utara	x	x	x	
21	Padang Lawas	x	x	x	
22	Labuhan Batu Selatan	√	√	√	14
23	Labuhan Batu Utara	√	√	√	8
24	Tapanuli Selatan	x	x	x	
25	Tapanuli Tengah	x	x	x	
26	Kota Binjai	√	√	√	7
27	Kota Tanjung Balai	x	x	x	
28	Kota Pematang Siantar	√	√	√	6
29	Kota Tebing Tinggi	x	x	x	
30	Kota Medan	√	√	√	1
31	Kabupaten Nias Barat	x	x	x	
32	Nias Selatan	x	x	x	
33	Nias Utara	x	x	x	

Sumber : BPS 2026

4. Hasil dan Pembahasan

Uji Asumsi Klasik

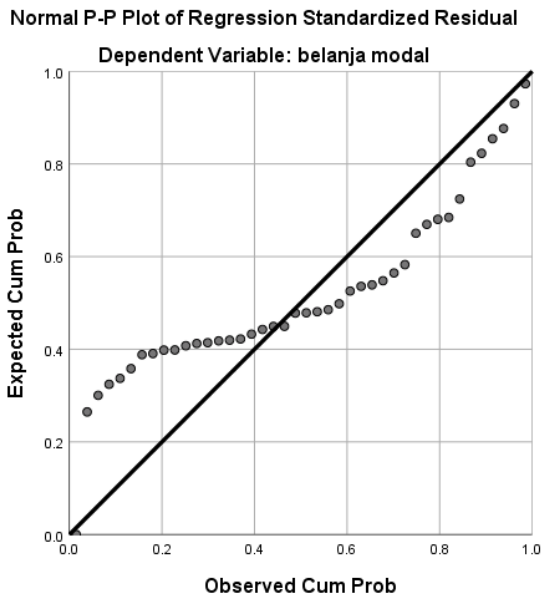
Tabel 4.1 Standart Deviasi

Descriptive Statistics			
	Mean	Std. Deviation	N
belanja modal	342.0714	248.26602	42
kontribusi pajak daerah	2697.4048	8149.84906	42
retribusi daerah	399.4286	531.80879	42
bagi hasil pajak	2702.1190	8146.62050	42

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 28

Dari data diatas dapat dilihat bahwa N atau sampel penelitian lakukan sebanyak 42 yang terdiri dari 14 kabupaten kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara selama waktu pengamatan 3 tahun yakni dari tahun 2022,2023 dan 2024. Sedangkan nilai Mean atau nilai rata-rata tertinggi sebesar 2702.1190. Standar deviasi nya sebesar 8149.8490.

1. Uji Normalitas

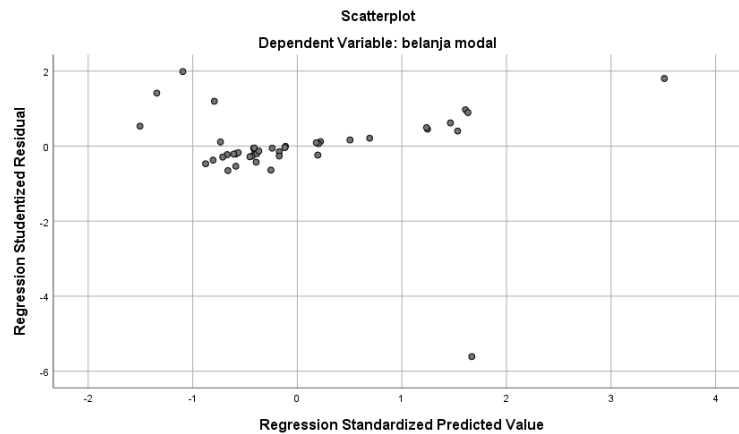


Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 28

Gambar 4.1 PP Plot Uji Normalitas

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa PP Plot uji Normalitas berdistribusi secara normal. Hal ini dapat dilihat dari titik-titik sampel yang berdistribusi secara normal mendekati garis diagonal.

2. Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 28

Gambar 4.2 Scatterplot

Tabel di atas menunjukkan bahwa data mengikuti distribusi normal. Hal ini dapat dilihat dari titik-titik sampel yang tersebar secara acak

3. Uji Autokolerasi

Tabel 4.2 Uji Autokolerasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Sig. F Change	Durbin-Watson
1	.953 ^a	.908	.000	1.927

a. Predictors: (Constant), bagi hasil pajak, retribusi daerah, kontribusi pajak daerah

b. Dependent Variable: belanja modal

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa nilai Durbin-Watson mendekati angka 2 yang berarti bahwa tidak adanya autokorelasi antar variabel.

4. Uji Secara Simultan (Uji F)

Tabel 4.3 Uji Secara Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2293619.324	3	764539.775	124.445	.000 ^b
	Residual	233457.462	38	6143.617		
	Total	2527076.786	41			

a. Dependent Variable: belanja modal

b. Predictors: (Constant), bagi hasil pajak, retribusi daerah, kontribusi pajak daerah

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 28

Dari uji yang dilakukan secara simultan dapat dilihat bahwa variabel yang berpengaruh sebesar 0,000 Hal ini dapat dinyatakan bahwa variabel penelitian secara simultan kontribusi pajak daerah, retribusi daerah dan bagi hasil pajak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

5. Uji Parsial (t)

Tabel 4.4 Uji secara Parsial (t)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	412.625	16.336		25.258	.000
	kontribusi pajak daerah	-.948	.079	-.31.131	-11.936	.000
	retribusi daerah	-.216	.034	-.463	-6.328	.000
	bagi hasil pajak	.953	.079	31.257	12.093	.000

a. Dependent Variable: belanja modal

Sumber : Hasil Pengolahan SPSS Versi 28

Dari uji yang dilakukan secara parsial dapat dilihat bahwa variabel independent secara parsial berpengaruh signifikan sebesar 0,000 terhadap variabel dependen dalam penelitian ini.

6. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

**Tabel 4.5 Koefisien Determinasi
Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	R Square Change
1	.953 ^a	.908	.900	78.38123	.908

a. Predictors: (Constant), bagi hasil pajak, retribusi daerah, kontribusi pajak daerah

b. Dependent Variable: belanja modal

Dari uji yang dilakukan secara koefisien determinasi dapat dilihat bahwa pengaruh setiap variabel independent terhadap variabel dependen sebesar 90 persen, sisa nya 10 persen dipengaruhi oleh variabel diluar penelitian ini.

4.2 Pembahasan

Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah terhadap Belanja Modal di Provinsi Sumatera Utara

Hasil pengujian menunjukkan bahwa kontribusi pajak daerah berpengaruh dan signifikan terhadap belanja modal di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan kontribusi pajak daerah tidak diikuti dengan peningkatan belanja modal, melainkan lebih diarahkan pada pembiayaan belanja operasional dan belanja rutin pemerintah daerah. Setiap peningkatan kontribusi pajak daerah justru diikuti penurunan belanja modal. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Rahmi (2018) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif Pajak Daerah terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Tengah, ditunjukkan dengan nilai koefisien korelasi = 0,633, koefisien determinasi= 0,400. Terdapat pengaruh positif Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Tengah, ditunjukkan dengan nilai koefisien korelasi= 0,498, koefisien determinasi= 0,248. Terdapat pengaruh positif Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal di Provinsi Jawa Tengah, ditunjukkan dengan nilai koefisien korelasi= 0,328, koefisien determinasi= 0,108. Terdapat pengaruh positif Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan secara bersama-sama terhadap Belanja Modal (Y) di Provinsi Jawa Tengah, ditunjukkan dengan nilai koefisien korelasi= 0,759, koefisien determinasi= 0,576.

Pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Modal di Provinsi Sumatera Utara

retribusi daerah terbukti berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan retribusi daerah mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan investasi dalam bentuk pembangunan infrastruktur dan aset daerah. Secara konseptual, retribusi daerah memiliki keterkaitan langsung dengan penyediaan layanan publik dan fasilitas daerah, seperti retribusi pasar, parkir, pelayanan kesehatan, dan perizinan. Oleh karena itu, peningkatan retribusi daerah cenderung diikuti oleh peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana, yang tercermin dalam belanja modal. Hasil ini mengindikasikan bahwa retribusi daerah berfungsi sebagai sumber pendanaan yang lebih fleksibel dan terarah, sehingga penggunaannya lebih mudah dikaitkan langsung dengan belanja modal. Pemerintah daerah cenderung mengalokasikan kembali penerimaan retribusi ke sektor-sektor yang menghasilkan retribusi tersebut, menciptakan siklus pembangunan yang lebih nyata dan terukur. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Monika (2021) menyatakan bahwa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak daerah dan Retribusi daerah Kota Bandung periode 2015 sampai dengan 2020 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal.

Pengaruh Dana Bagi Hasil Pajak terhadap Belanja Modal di Provinsi Sumatera Utara

Dana Transfer ke Daerah (TKD), DBH Pajak menjadi instrumen krusial dalam menambal keterbatasan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendanai proyek infrastruktur. Hasil penelitian Tasya (2025) mengonfirmasi bahwa Dana Bagi Hasil Pajak secara empiris berpengaruh terhadap peningkatan kapasitas Belanja Modal di wilayah Sumatera Utara. Nilai signifikansi yang ditemukan berada di bawah ambang batas kritis ($P\text{-Value} < 0.15$), yang berarti kenaikan penerimaan DBH Pajak cenderung diikuti oleh peningkatan anggaran infrastruktur. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil Pajak berpengaruh terhadap belanja modal di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini mengindikasikan bahwa DBH pajak memiliki peran strategis dalam mendukung pembiayaan belanja pembangunan, khususnya belanja modal yang berkaitan dengan penyediaan aset dan infrastruktur daerah

5. Kesimpulan

1. Pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan pajak daerah secara langsung mendorong peningkatan investasi pemerintah daerah dalam bentuk belanja modal, karena pajak daerah lebih banyak dialokasikan untuk membiayai belanja pemerintah
2. Retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Temuan ini mengindikasikan bahwa retribusi daerah memiliki keterkaitan yang kuat dengan penyediaan fasilitas dan pelayanan publik, sehingga peningkatan retribusi daerah cenderung diikuti oleh peningkatan belanja modal sebagai bentuk investasi jangka panjang pemerintah daerah.
3. Dana bagi hasil pajak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hal ini menunjukkan bahwa dana bagi hasil pajak dimanfaatkan secara optimal untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah dan belanja lainnya.

Daftar Pustaka

- Adyatma, E. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Pemoderasi. e-jurnal Akuntansi Universitas Stikubank.
- Anggun Hassan (2016). Alokasi Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal (Studi Di Kota Manado Tahun 2005-2015).
- Ayu Kurnia Sari (2021) Analisis Pengaruh Tingkat Kemandirian Fiskal, Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara
- Apriliawati (2020) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah Kota Bandung. Jurnal ilmu riset Akuntansi
- Badan Pusat Statistik. (2021). Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara 2018-2019. BPS Provinsi Sumatera Utara/BPS-Statistics of Sumatera Utara Province.
- Bastian, R. (2015). Buku Pintar Terlengkap Sistem-sistem Pemerintahan Sedunia: Ragam Bentuk dan Sistem Pemerintahan Negara-negara.

Erlina (2021), Metode Penelitian, USU Press.

Ghozali, I. (2015). BPFE. *Jurnal Jom FEKON*, 2(2), 1-15.

Henny A. Manafe (2023) Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah dan Restribusi Daerah terhadap Belanja Daerah (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Keuangan Daerah)

Indonesia, P. R. (2010). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta (ID): Sekretariat Negara.

Mardiasmo (2021) Akuntansi sektor publik-edisi terbaru. Penerbit Andi.

Mangkoesebroto, G. I. C. (2019). Tax incidence in a developing country: the case of Indonesia. University of Colorado at Boulder.

Mahagiyani, M., Sugiono, S., & SIP, M. (2024). Buku ajar metodologi penelitian.

Monika, Diana Pratiwi (2021) Analisis Kontribusi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Belanja Modal Kota Bandung Tahun 2015-2020

Milanie, F., Sari, A. K., & Saputra, H. (2020). An Effect of Empowerment Organizational Structure and Job Design Employee Effectiveness Work in the Office Directors of PTPN II Tanjung Morawa. *International Journal of Management*, 11(5)

Nasution, D. A. D., & Ramadhan, P. R. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kebijakan Deviden Pada Perusahaan LQ 45. *Bisnis-Net Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 3(1), 6-17.

Putu Candra Gunantara (2014) dengan Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Pada Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Pemoderasi Di Bali

Ramadhan, P. R. (2019). Pengaruh Implementasi E-Budgeting Terhadap Transparansi Keuangan Daerah Di Indonesia Dito Aditia Darma Nasution. *E-Jurnal Akuntansi*, 28, 669-693.

Rachmi Intani (2018) Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal kajian akuntansi*

Rahmawati (2017) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah Kota Bandung. *Jurnal kajian akuntansi*

Rudy Pudjut Harianto (2021) Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Pemerintah Kota Balikpapan

Sari, A. K., Saputra, H., & Ramadhani, U. (2020). The effect of socialization, tax examination and tax collection on pph at kpp pratama medan petisah. *Accounting and Business Journal*, 2(1), 71-75.

Salsabila (2022) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kota Balikpapan Tahun 2016-2020

Sucipto, T.N. (2025, October). Analysis of the role of public sector internal auditors in risk mitigation fraud in the public sector. In *Proceedings of International Conference on Islamic Community Studies* (pp. 1906-1916).

Susi Susanti (2018) Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil terhadap Belanja Modal (Studi pada Kabupaten/kota di Wilayah Aceh)

Tia, N. S. (2024). Analysis Implementation System Control Internal Government In Indonesia. World, 24(3), 590-597

Widya Pangestika (2018) Kemampuan Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Bagi Hasil Pada Belanja Modal Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah